

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah dan Laba Bumd terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan

Analysis Contribution of Regional Retribution and Profit of Regional Owned Enterprises on Local Own Revenue (LOR) in South Kalimantan Province

M. Lazuardi

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
mlazuardi55@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the level of contribution and effectiveness of regional retribution and profit of regional owned enterprises to LOR and efforts that can be done to improve the acceptance of local retribution and gain of regional owned enterprises in South Kalimantan Province. The research method used is the descriptive quantitative method. This study indicates that regional retribution and profits of local owned enterprises to LOR in South Kalimantan Province from 2014-2016 are still low. In the 2014-2016 period, the effectiveness of regional retribution and regional-owned enterprises was beneficial. This means that the realization of local levies and profits of regional owned enterprises in the 2014-2015 period always reaches the target. Then efforts can be made to increase revenues and the contribution of local retribution to LOR, namely through intensification and extensification. Simultaneously, the effort to improve regionally owned enterprises' income is through rearrangement and improvement of company management, training, or coaching of regional owned enterprises employees.

Keywords: *Contribution, Effectiveness, Regional Retribution, Profit of Regional Owned Enterprises, and Local Own Revenue.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi dan efektivitas retribusi daerah dan laba BUMD terhadap PAD serta upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan laba BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan. Deskriptif kuantitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah dan laba BUMD terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2014-2016 masih rendah. Kemudian dalam periode 2014-2016 hasil dari efektivitas retribusi daerah dan BUMD sangat efektif. Ini artinya realisasi dari retribusi daerah dan laba BUMD dalam periode 2014-2015 selalu mencapai target. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan sekaligus kontribusi retribusi daerah terhadap PAD yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan upaya untuk meningkatkan penerimaan BUMD yaitu melalui penataan ulang serta perbaikan manajemen perusahaan, pelatihan atau pembinaan pengelola BUMD.

Kata Kunci : *Kontribusi, Efektivitas, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mencari dan mendapatkan sumber keuangan daerahnya sendiri yang sumber-sumbernya tersebut tertuang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap daerahnya sendiri dan terhadap pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah diantaranya melalui retribusi daerah dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki di daerah.

Implikasi dari adanya otonomi daerah dimana penyerahan hak dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disertai dengan pelimpahan wewenang dalam bidang keuangan (desentralisasi fiskal) sehingga membutuhkan dana yang cukup besar.

Dalam otonomi daerah, salah satu indikator keberhasilan daerah atau yang disebut dengan kemandirian daerah yaitu dapat dilihat dari kondisi PAD daerahnya. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya dalam membiayai semua penyelenggaraan daerah dan dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat sehingga diharapkan PAD memberikan peran terbesar dalam keuangan daerah.

PAD yang merupakan sumber utama dalam penerimaan daerah maka dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan hal-hal yang menjadi sumber penerimaan PAD agar dapat optimal. PAD yaitu jenis penerimaan daerah yang wajib ditingkatkan pertumbuhan pendapatannya, dengan melakukan pemungutan yang sudah diatur berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku (Yani, 2002). Selain itu, PAD menjadi indikator dalam menentukan kemandirian daerah. Karena semakin tinggi penerimaan PAD akan

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sumber-sumber penerimaan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD. Dilihat dari jumlah penerimaannya pajak daerah menjadi sumber penerimaan terbesar dibanding sumber yang lain. Artinya hasil penerimaan retribusi daerah dan laba BUMD kurang berkontribusi pada PAD. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan usaha BUMD terdapat masalah sehingga berdampak pada rendahnya jumlah penerimaan. Penerimaan PAD Provinsi Kalimantan selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2014-2016

| Jenis Pendapatan | Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Rp) | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.948.443.941.504 | 2.694.010.483.420 | 2.499.859.767.333 |
| Pajak Daerah | 2.395.925.506.280 | 2.040.592.214.325 | 1.867.418.943.430 |
| Retribusi Daerah | 20.001.836.517 | 41.890.654.031 | 27.496.361.268 |
| Hasil Laba BUMD | 46.738.000.990. | 50.306.975.725 | 45.668.602.602 |

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan

Dapat dilihat dari tabel di atas realisasi PAD di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2014-2016. Hingga tahun 2016 realisasi PAD selalu mengalami penurunan. Sumber penerimaan terbesar didominasi oleh pajak daerah tiap tahunnya. Sedangkan dua sumber penerimaan lain yaitu retribusi daerah dan laba BUMD masih rendah. Tinggi rendahnya tingkat penerimaan retribusi daerah dan laba BUMD akan berdampak pada tingkat penerimaan PAD di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga perlu upaya bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan

kinerja BUMD agar dapat memberikan laba yang besar dan kontribusinya terhadap PAD akan semakin meningkat.

Dengan segala potensi-potensi yang ada di negeri ini seharusnya dapat mensejahterakan rakyatnya jika di kelola dengan benar oleh negara. Negara memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya dan melayani kepentingan rakyatnya. tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Begitu pentingnya kontribusi retribusi daerah dan laba BUMD dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD bagi suatu daerah maka tanggungjawab yang lebih serius dari pemerintah untuk mengelola dan mengembangkannya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi daerah ataupun masyarakat. Karena retribusi daerah dan BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian daerah. Tinggi rendahnya tingkat penerimaan retribusi daerah dan laba BUMD akan berdampak pada tingkat penerimaan PAD di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga penting bagi pemerintah untuk selalu meningkatkan jumlah penerimaan PAD melalui sumber-sumber penerimaannya yang diantaranya melalui retribusi daerah dan laba BUMD.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana kontribusi retribusi daerah dan laba BUMD terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan; 2. Bagaimana efektivitas retribusi daerah dan laba BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan laba BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi daerah dan Laba BUMD terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian mengetahui efektivitas retribusi daerah dan Laba BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan; serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan Laba BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah berupa hasil dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Halim, 2007).

UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan sumber-sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah

Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah suatu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang ada di daerah dan disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat atau badan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa BUMD adalah suatu badan usaha yang modalnya seluruh atau sebagian dimiliki oleh daerah. BUMD yang modalnya terbagi atas saham paling sedikit modalnya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh satu daerah. Maka badan usaha yang dapat dikatakan BUMD atau perusahaan milik pemerintah daerah adalah jika seluruh atau minimal 51% modalnya dimiliki oleh pemerintah.

Peraturan Terkait BUMD

Saat ini BUMD diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang sebelumnya diatur dengan UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai BUMD adalah badan usaha yang modalnya seluruh atau sebagian dimiliki pemerintah daerah. Dalam pasal 331 UU Nomor 23 Tahun 2014 didirikannya BUMD untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah, menyediakan barang dan/atau jasa untuk kemanfaatan umum serta memperoleh laba atau keuntungan.

Hubungan Retribusi Daerah dan BUMD dengan PAD

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber-sumber penerimaan PAD. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi daerah, salah satunya retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi hasil penerimaan retribusi daerah disuatu daerah maka juga akan berdampak pada meningkatnya PAD, karena retribusi daerah berkontribusi secara langsung dalam peningkatan penerimaan PAD.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji mengenai keuangan daerah, khususnya PAD seperti Jolianis (2012) yang menganalisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dimana kondisi PAD yang digambarkan dalam penelitian ini dalam periode 2005-2009 dalam kondisi yang sehat, dapat dilihat secara kuantitas PAD Sumatera Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari hasil penelitian ini, masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal menghimpun PAD dan dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai PAD tertinggi adalah kota padang dan yang terendah kota pariaman.

Boby Fandhi Putra (2014) judul penelitian “Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). Dari hasil penelitian ini, dalam periode 2008-2012 efektivitas penerimaan retribusi daerah sudah efektif. Sedangkan kontribusinya terhadap PAD selama periode tersebut termasuk kategori rendah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kondisi

retribusi daerah kota Blitar dalam hal penerimaan tergolong kurang memberikan dampak positif terhadap PAD. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Arief Himmawan DN dan Djoko Wahjudi (2014) dengan penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta). Dalam penelitian ini khusus untuk kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, Kota Surakarta lebih optimal kontribusinya dibanding Kota Semarang. Namun kontribusi retribusi di Kota Semarang lebih besar terhadap APBD terbukti dari kemampuannya dalam membiayai belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Semarang lebih mandiri dibanding pemerintah Kota Surakarta. Karena kontribusinya terhadap PAD dan APBD lebih besar dan juga mampu untuk membiayai belanja daerahnya.

Penelitian yang dilakukan Edie Sugiarto (2016) dengan judul “Analisis Kontribusi Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Lamongan” menunjukkan bahwa kondisi PAD di Kabupaten Lamongan masih kurang dalam jumlah penerimaan atau dengan kata lain PAD Kabupaten Lamongan belum dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Dari hasil penelitian yang menunjukkan kontribusi perusahaan daerah termasuk dalam kriteria relatif tidak memberikan berkontribusi. Dimana dalam periode 2010-2014 rata-rata tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam memberikan laba terhadap PAD masih rendah walaupun ada mengalami peningkatan dalam tahun tertentu namun masih kurang dalam hal memberikan kontribusi. Ini artinya kondisi perusahaan daerah Kabupaten Lamongan masih belum optimal dalam menjalankan usahanya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari instansi terkait yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan bagian Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berupa informasi mengenai retribusi daerah dan BUMD. Data sekunder

dalam penelitian ini yaitu data berupa hasil penerimaan retribusi daerah dan hasil laba BUMD tahun 2014-2016 yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan cara dokumentasi dan wawancara dalam memperoleh data.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu analisis kontribusi dan efektivitas. Rumus yang digunakan yaitu:

- Untuk melihat kontribusi retribusi daerah digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH}}{\text{TOTAL PAD}} \times 100$$

- Untuk melihat kontribusi BUMD digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Bumd} = \frac{\text{PENERIMAAN BUMD}}{\text{TOTAL PAD}} \times 100$$

Setelah didapatkan hasilnya kemudian dibandingkan dengan kriteria kontribusi menurut (Bawazier, 1999) yaitu:

Tabel 1
Hasil Presentase Kontribusi

| Presentase | Kriteria |
|-------------------|------------------------------------|
| 0-0,9% | Relatif tidak mempunyai kontribusi |
| 1-1,9% | Kurang mempunyai kontribusi |
| 2-2,9% | Cukup mempunyai kontribusi |
| 3-3,9% | Mempunyai kontribusi |
| >4% | Sangat mempunyai kontribusi |

Efektivitas dalam penelitian ini menggambarkan kemampuan retribusi daerah dan BUMD dalam merealisasikan hasil penerimaannya dibanding target yang telah ditetapkan.

Rumus efektivitas yaitu :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Hasil Retribusi}}{\text{Target Hasil Retribusi}} \times 100$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Hasil BUMD}}{\text{Target Hasil BUMD}} \times 100$$

Kriteria efektivitas menurut (Mahmudi, 2010) sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Presentase Efektivitas

| Presentase kinerja keuangan | Kriteria |
|------------------------------------|-----------------|
| >100% | Sangat efektif |
| 100% | Efektif |
| 90%-99% | Cukup efektif |
| 75%-89% | Kurang efektif |
| <75% | Tidak efektif |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2014-2016

| Tahun | Jumlah (Rp) |
|--------------|--------------------|
| 2014 | 2.984.433.941.504 |
| 2015 | 2.694.010.483.420 |
| 2016 | 2.449.859.767.333 |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah PAD dari tahun 2014-2016 berdasarkan tabel 3 selama periode tersebut mengalami penurunan tiap tahunnya. Tahun 2014 jumlah penerimaan PAD sebesar Rp. 2.984.433.941.504 kemudian turun ditahun 2015 menjadi Rp. 2.694.010.483.420 dan 2016 sebesar Rp. 2.449.859.767.333. Salah satu penyebab menurunnya jumlah penerimaan PAD tersebut disebabkan rendahnya jumlah penerimaan retribusi daerah dan laba BUMD yang diterima.

Kontribusi Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan

1. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Berikut hasil dari kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 :

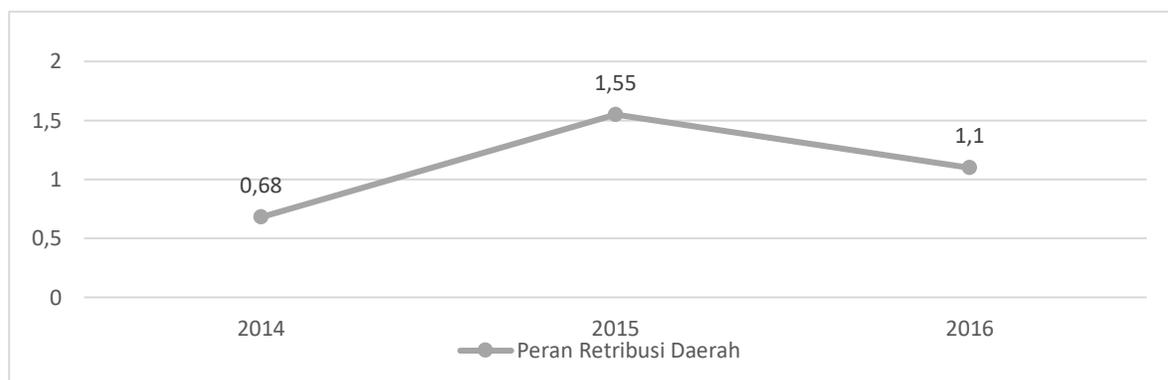
Tabel 4
Hasil Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2014-2016

| Tahun | Penerimaan Retribusi (Rp) | Penerimaan PAD (Rp) | (%) | Kriteria |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2014 | 20.001.837.517 | 2.948.443.941.504 | 0,68 | Relatif tidak memberikan kontribusi |
| 2015 | 41.890.654.031 | 2.694.010.483.420 | 1,55 | Kurang memberikan kontribusi |
| 2016 | 27.496.361.268 | 2.449.859.767.333 | 1,10 | Kurang memberikan kontribusi |
| Rata-rata | | | 1,11 | |

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan

Dari hasil tabel 4, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2014-2016 kontribusinya masih kecil. Dapat dilihat pada tahun 2014 persentase kontribusi 0,68% yang termasuk dalam kriteria relatif tidak mempunyai kontribusi dengan jumlah Rp. 20.001.837.517, pada tahun 2015 hasil penerimaan meningkat signifikan dengan persentase 1,55% namun masih termasuk dalam kriteria kurang mempunyai kontribusi dengan hasil penerimaan sebesar Rp. 41.890.654.031, dan pada tahun 2016 turun kembali dengan persentase 1,10% termasuk dalam kriteria kurang mempunyai kontribusi dengan hasil penerimaan Rp. 27.496.361.268. Dari hasil persentase tersebut menurut kriteria Fuad Bawazier (1999:103) secara umum retribusi daerah kurang berkontribusi terhadap penerimaan PAD di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, rata-rata persentase kontribusi

retribusi daerah dari tahun 2014-2016 adalah 1,11% yang artinya kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih rendah atau kurang berkontribusi.



Gambar 1: Grafik Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah)

2. Kontribusi Laba BUMD Terhadap PAD

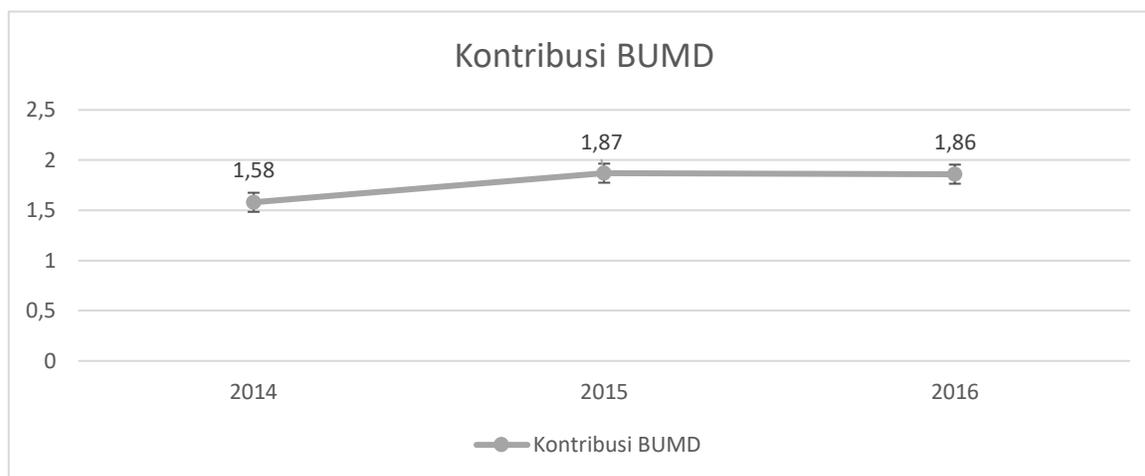
Berikut hasil dari kontribusi laba BUMD terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2016 :

Tabel 6
Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016

| Tahun | Penerimaan Laba BUMD (Rp) | Penerimaan PAD (Rp) | (%) | Kriteria |
|------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| 2014 | 46.738.000.990 | 2.948.443.941.504 | 1,58 | Kurang memberikan kontribusi |
| 2015 | 50.306.975.725 | 2.694.010.483.420 | 1,87 | Kurang memberikan kontribusi |
| 2016 | 45.668.602.602 | 2.449.859.767.333 | 1,86 | Kurang memberikan kontribusi |
| Rata-rata | | | 1,77 | |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil kontribusi laba BUMD terhadap PAD berdasarkan tabel 6 terjadi fluktuasi dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 persentase kontribusi laba BUMD terhadap PAD sebesar 1,58%. Jumlah ini kemudian meningkat ditahun 2015 sehingga menjadi 1,87% kemudian turun kembali pada tahun 2016 menjadi 1,86%. Hasil persentase kontribusi laba BUMD dari tahun 2014-2016 rata-rata 1,77% yang menunjukkan kontribusi laba BUMD termasuk dalam kriteria kurang memberikan kontribusi.



Gambar 2 : Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah)

Pada gambar 2 grafik mengenai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah secara umum dari tahun 2014-2016 kontribusi BUMD kurang mempunyai kontribusi karena hasil persentase rata-rata berada pada 1,77%. Sehingga dapat diketahui bahwa BUMD milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2014-2016 kurang mempunyai kontribusi terhadap penerimaan PAD.

Jenis BUMD yang berkontribusi paling besar berdasarkan bidang usaha BUMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
BUMD Yang Berkontribusi Paling Besar
Tahun 2014-2016

| BUMD | Kontribusi (%) | | | Rata-rata (%) |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PT Bank Kalsel | 90,04 | 95,85 | 94,03 | 93,30 |
| PT Bangun Banua | 5,59 | - | - | - |
| Asuransi ASKRIDA | 0,06 | 0,72 | 1,02 | 0,60 |
| PDAM Bandarmasih dan Intan Banjar | 0,85 | - | 2,75 | 1,80 |
| PT Jamkrida | - | 1,70 | 1,10 | 1,40 |
| Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) | 3,27 | 1,71 | 1,09 | 2,02 |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Terdapat 6 (enam) BUMD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari PT Bank Kalsel, PT Bangun Banua, Asuransi ASKRIDA, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT Jamkrida, dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Tingkat kontribusi terbesar rata-rata selama tiga tahun yaitu tahun 2014-2016 dimiliki oleh PT Bank Kalsel sebesar 93,30%. Selanjutnya, perusahaan BPR menjadi penyumbang kedua dalam penerimaan laba BUMD dengan jumlah rata-rata 2,02%. Dan yang ketiga yaitu PDAM dengan rata-rata 1,80%. Sedangkan perusahaan daerah lainnya dengan tingkat rata-rata dibawah 3% menunjukkan kontribusi BUMD dalam menyumbang laba masih sangat rendah.

Efektivitas Retribusi Daerah dan Laba BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan

1. Efektivitas Retribusi Daerah

Hasil perhitungan efektivitas retribusi daerah menunjukkan jumlah realisasi retribusi daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan pada periode tertentu.

Tabel 8
Hasil Efektivitas Retribusi Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2014-2016

| Tahun | Jumlah (Rp) | | % | Kriteria |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Target | Realisasi | | |
| 2014 | 18.327.228.000 | 27.496.361.268 | 109,13 | Sangat Efektif |
| 2015 | 31.447.425.000 | 41.890.654.031 | 133,21 | Sangat Efektif |
| 2016 | 25.980.253.000 | 27.496.361.268 | 105,84 | Sangat Efektif |
| Rata-rata | | | 116,06 | |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel 8, retribusi daerah tahun 2014-2016 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Hasil persentase rata-rata dari tahun 2014-2016 yaitu 116,06% yang berdasarkan kriteria Mahmudi (2010) retribusi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sangat efektif. Hal ini menunjukkan retribusi daerah mampu dalam merealisasikan hasil penerimaannya yang telah ditargetkan.

2. Efektivitas Laba BUMD

Efektivitas BUMD adalah capaian realisasi laba BUMD terhadap target yang telah ditetapkan pada periode tertentu.

Tabel 9
Hasil Efektivitas Laba BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2014-2016

| Tahun | Jumlah (Rp) | | % | Kriteria |
|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | Target | Realisasi | | |
| 2014 | 45.352.592.000 | 46.738.000.990 | 103,05 | Sangat Efektif |
| 2015 | 51.216.988.000 | 50.306.975.725 | 98,22 | Cukup Efektif |
| 2016 | 45.700.682.000 | 45.668.602.602 | 99,93 | Cukup Efektif |
| Rata-rata | | | 100,4 | |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Efektivitas laba BUMD berdasarkan tabel 9 dilihat dari rata-rata hasil perhitungan dari tahun 2014-2016 sebesar 100,4% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Tahun 2014 laba BUMD yang ditargetkan sebesar Rp. 45.352.592.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45.889.236.936 dengan persentase 103,05%, kemudian turun karena pada tahun 2015 penerimaan laba BUMD tidak mencapai target, dapat dilihat dari target penerimaan laba BUMD Rp. 51.216.988.000 dan terealisasi Rp. 49.599.438.120 dengan persentase 98,22%, dan naik kembali pada tahun 2016 laba BUMD yang ditargetkan Rp. 45.700.682.000 dan terealisasi Rp. 45.267.631.218 dengan persentase 99,93%. Pada tahun 2016 juga tidak mencapai target. Maka dari persentase perhitungan pada tabel diatas kategori kriteria efektivitasnya pada tahun 2014 termasuk dalam kategori sangat efektif, tahun 2015 dan 2016 termasuk dalam kategori cukup efektif.

Masalah dalam Penerimaan Retribusi Daerah dan BUMD

Masalah dalam Penerimaan Retribusi

Beberapa permasalahan dalam pemungutan retribusi daerah seperti yang dikemukakan Rusmawardi (2006), seperti :

1. Belum jelasnya penentuan tarif retribusi daerah mengenai berapa tarif yang dikenakan.
2. Kemampuan atau keahlian pengelola retribusi daerah yang belum merata.
3. Kurangnya kesadaran wajib retribusi daerah dalam membayar retribusi, serta
4. Pemahaman para pengelola mengenai tata kerja dan prosedur belum merata.

Masalah dalam Penerimaan BUMD

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola BUMD terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan BUMD, diantaranya yaitu 1) Permasalahan dalam manajemen perusahaan; 2) Masih rendahnya keterampilan Sumber Daya Manusia yang mengelola; 3) Terdapat banyak biaya yang tidak terduga sehingga mengurangi kas perusahaan; 4) Biaya yang lebih tinggi dari pada penerimaan (rugi); 5) Adanya persaingan dengan pihak swasta yang mempunyai usaha sejenis; 6) Fasilitas maupun kondisi peralatan/mesin yang sudah ketinggalan sehingga kalah bersaing; 7) Terdapat banyak aset perusahaan yang tidak produktif, seperti tanah dan bangunan akibatnya biaya operasional relatif tinggi.

Rendahnya penerimaan sebagian BUMD dibanding perusahaan swasta bukan menjadi permasalahan utama karena mengingat dibentuknya BUMD untuk kemakmuran masyarakat daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD juga untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi daerah. Artinya selain untuk memberikan laba dalam meningkatkan penerimaan PAD juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti barang dan jasa dengan memberikan pelayanan yang baik, sehingga dalam hal ini kepuasan masyarakat terhadap adanya BUMD juga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu BUMD dalam melaksanakan fungsinya serta sebagai motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi di daerah.

Upaya Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah dan BUMD Terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan

Upaya Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah

Berdasarkan penelitian oleh Boby Fandhi Putra, Dwi Atmanto dan Nila Firdausi Nuzula (2014) untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah yaitu dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya melalui intensifikasi antara lain yaitu melakukan perbaikan sistem perusahaan serta peraturan dalam proses pemungutan retribusi daerah dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban dalam membayar retribusi

Upaya selanjutnya yaitu ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah upaya yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan sumber pendapatan retribusi daerah dengan cara mencari, menggali dan melakukan pendataan pada objek-objek baru di Kalimantan Selatan yang berpotensi untuk dilakukan pemungutan retribusi.

Upaya Meningkatkan Penerimaan BUMD

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan serta dalam rangka meningkatkan penerimaan BUMD berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BUMD Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya yaitu :

1. Peremajaan usaha, yaitu dengan melakukan penataan ulang serta perbaikan manajemen pada jenis-jenis usaha yang dijalankan.
2. Menambah usaha baru yang berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan menyumbang laba pada PAD

3. Memprioritaskan pada jenis usaha yang memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan perusahaan
4. Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki usaha sejenis atau yang dapat memudahkan perusahaan dalam meningkatkan penerimaannya
5. Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyeleksi SDM yang berpengalaman dan kompeten dibidangnya serta memberikan pelatihan atau pembinaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kontribusi retribusi daerah dalam kurun waktu 2014-2016 terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum masih rendah. Sedangkan untuk BUMD kontribusinya terhadap PAD dari tahun 2014-2016 masih rendah. Dari jumlah BUMD yang dimiliki pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, BUMD yang paling tinggi kontribusinya dalam menyumbang laba BUMD terhadap penerimaan PAD adalah BPD Prov. Kalsel dan kontribusi yang paling rendah adalah Asuransi ASKRIDA. Kemudian, Efektivitas penerimaan Retribusi Daerah dan BUMD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2014-2016 termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Masalah dalam pelaksanaan retribusi daerah yang menyebabkan kontribusinya rendah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu penetapan tarif retribusi yang belum jelas, kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar, belum optimalnya kemampuan serta tata kerja pengelola retribusi. Sedangkan permasalahan BUMD yaitu rendahnya kinerja SDM yang mengelola.

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu upaya oleh pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah, seperti melakukan perbaikan peraturan dalam proses penerimaan retribusi daerah, serta melakukan sosialisasi tentang kewajiban

membayar retribusi. Sedangkan ekstensifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan dan memperluas sumber penerimaan retribusi daerah, dengan melakukan pendataan terhadap objek-objek yang berpotensi sebagai retribusi daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan laba BUMD yaitu melakukan pembinaan yang bertanggungjawab dan intensif oleh pemerintah daerah. Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang mengelola, dilakukan pelatihan atau pembinaan yang dapat meningkatkan kemampaan serta keahlian pengelola BUMD.

Keterbatasan Penelitian

Masih kurangnya penjelasan pada beberapa objek Retribusi Daerah dan pada masing-masing BUMD karena kurangnya data maupun informasi yang didapatkan, terbatasnya waktu dan ketersediaan data yang diperoleh di Dinas Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, kemudian penelitian ini hanya menggunakan beberapa BUMD yang diteliti dari jumlah keseluruhan BUMD yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan karena keterbatasan data yang diperoleh.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil kontribusi retribusi daerah dan laba BUMD terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil kontribusi retribusi daerah dalam menyumbang penerimaannya terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah. Rendahnya kontribusi retribusi daerah ini disebabkan kemampuan pengelola retribusi daerah yang belum merata serta kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar, sehingga hal ini menyebabkan penerimaan retribusi daerah masih rendah. Maka untuk mengatasi masalah tersebut serta untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat

melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tersebut yaitu dengan cara melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kontribusi BUMD dalam menyumbang laba terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan juga masih rendah. Hal ini karena permasalahan manajemen perusahaan, aset perusahaan yang tidak produktif hingga kalah persaingan dengan perusahaan swasta yang sejenis sehingga membuat penerimaan BUMD lebih kecil dibanding pengeluarannya (rugi). Maka untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat melakukan upaya dalam meningkatkan laba BUMD seperti melakukan peremajaan usaha, memprioritaskan pada usaha yang berpotensi besar untuk dikembangkan, serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat saling menguntungkan.

Dalam rangka meningkatkan PAD melalui sumber-sumber penerimaannya seperti retribusi daerah dan laba BUMD maka perlu bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaannya. Karena retribusi daerah dan laba BUMD menentukan tinggi rendahnya penerimaan PAD.

DAFTAR REFERENSI

- Arief Himmawan, & Djoko Wahjudi. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (studi Kmparasi Pemerintah Kota Semarang dan surakarta). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol.21, No.2.
- Bawazier, F. (1999). *Peran dan Strategi Keuangan di Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Boby Fandhi Putra, Dwi Atmanto, & Nila Firdausi Nuzula. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol.10 No.1, 7.
- Halim, A. (2007). *Analisis sektor Publik Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: salemba Empat.

- Jolianis. (2012). Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Program studi Pendidikan Ekonomi sTKIP PGRI Sumatera Barat Vol. 1 No. 1.*
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Rusmawardi, M. (2006). Pajak dan Retribusi Daerah dan Peranannya Terhadap Pembangunan Daerah (Studi di Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah). 140.
- Sugiarto, E. (2016). Analisis Kontribusi Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen Volume I No.03.*
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- UU Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- UU Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*